

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Bukan sekedar kewenangan semata untuk pemerintah daerah namun juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Untuk itu, perlu penyajian secara baik dan benar dalam penyampaian informasi pengelolaan keuangan daerah. Hasil dari penyajian ini akan mencerminkan bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pengertian pengelolaan daerah menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Dalam pengelolaan keuangan daerah memerlukan suatu sistem akuntansi. Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah : “Rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah”.

Sistem informasi akuntansi merupakan alat bagi pemerintah dalam menyajikan informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi membantu pemerintah dalam mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memelihara, dan mengolah transaksi menjadi sebuah informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi dikatakan baik jika pelaksanaan sistem informasi akuntansi dapat dipahami oleh pengguna informasi. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan sistem informasi akuntansi agar menghasilkan kualitas informasi yang baik.

Salah satu penerapan sistem informasi akuntansi dapat dilaksanakan pada penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan dan pengeluaran kas merupakan ujung tombak dalam keterjadian suatu aktivitas atau transaksi akuntansi. Adanya penerapan sistem informasi akuntansi pada penerimaan dan pengeluaran kas daerah akan lebih merepresentasikan transparansi pemerintah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD sehingga menciptakan kepercayaan masyarakat akan akuntabilitas pemerintah.

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang menjelaskan proses atau aktivitas yang dilakukan oleh entitas internal untuk mengubah atau menghasilkan suatu entitas eksternal. Selain itu, sistem informasi akuntansi merupakan aliran data input yang dari setiap aliran terjadi suatu proses, nantinya akan menghasilkan output atau sebuah informasi. Keberhasilan sistem informasi tergantung bagaimana aliran sistem tersebut berjalan sehingga mampu menghasilkan informasi yang baik serta kemudahan sistem tersebut dipahami oleh pengguna informasi. Untuk itu, pemerintah dapat memanfaatkan sistem informasi akuntansi dalam merepresentasikan pelaksanaan APBD sehingga

penyajian hasil kinerja pemerintah akan lebih dapat memenuhi kriteria penilaian informasi. Selain itu, semakin berkembangnya teknologi saat ini diperlukan juga pengembangan sistem informasi yang lebih baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKD) Kota Pariaman selaku lembaga yang menjalankan urusan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan dan pendapatan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menghasilkan suatu informasi yang tepat dan akurat dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut BPKPD Kota Pariaman dapat menyajikan informasi akuntansi bagaimana penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di lingkungan BPKPD Kota Pariaman dan bagaimana pertanggungjawabannya atas APBD.

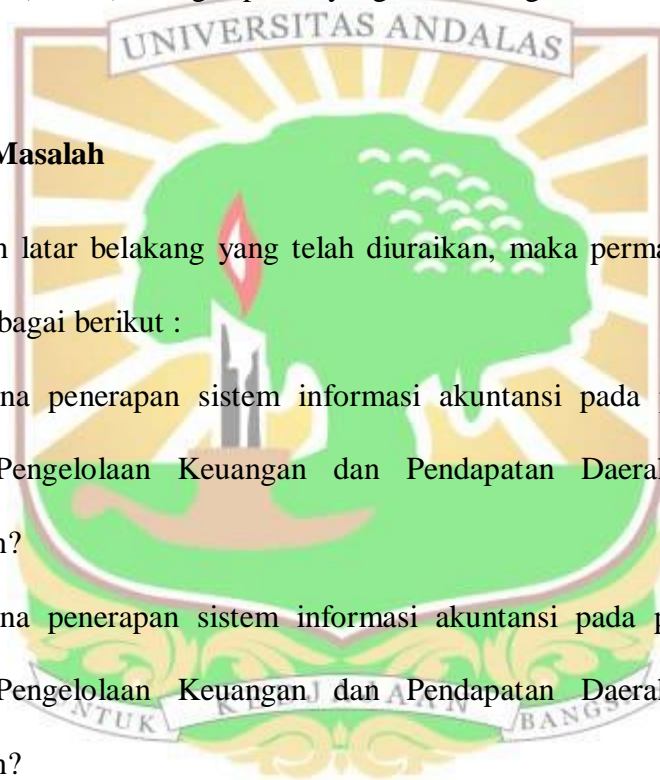
Sistem penerimaan kas yang terjadi di BPKPD Kota Pariaman ialah penerimaan dari pembayaran pajak atau retribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak. Pembayaran pajak atau retribusi akan ditampung oleh Bendahara Penerimaan. Setelah itu, penerimaan akan diserahkan ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Penerimaan dari pembayaran pajak akan dimasukkan ke rekening kas daerah dan digunakan untuk kepentingan daerah. Pembayaran retribusi akan dimasukkan ke rekening kas daerah dan digunakan untuk kepentingan wajib pajak. Proses pengeluaran kas yang diterjadi di BPKPD Kota Pariaman adalah pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang digunakan untuk menjalankan aktivitas operasional Pegawai BPKPD. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP merupakan uang muka kerja yang diajukan

sekali dalam setahun nantinya digunakan untuk menjalankan fungsi operasional BPKPD Kota Pariaman. UP dirancang di dalam APBD dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020. Selain pengeluaran UP, pengeluaran lainnya yaitu Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan Pembayaran Langsung (LS). Dana yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional diterima dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai pihak yang berwenang dalam mengelola keuangan daerah.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pada penerimaan kas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman?
2. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pada pengeluaran kas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman?



### 1.3. Tujuan Magang

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan magang adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi pada penerimaan kas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.
2. Untuk menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi pada pengeluaran kas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.

### 1.4. Manfaat Magang

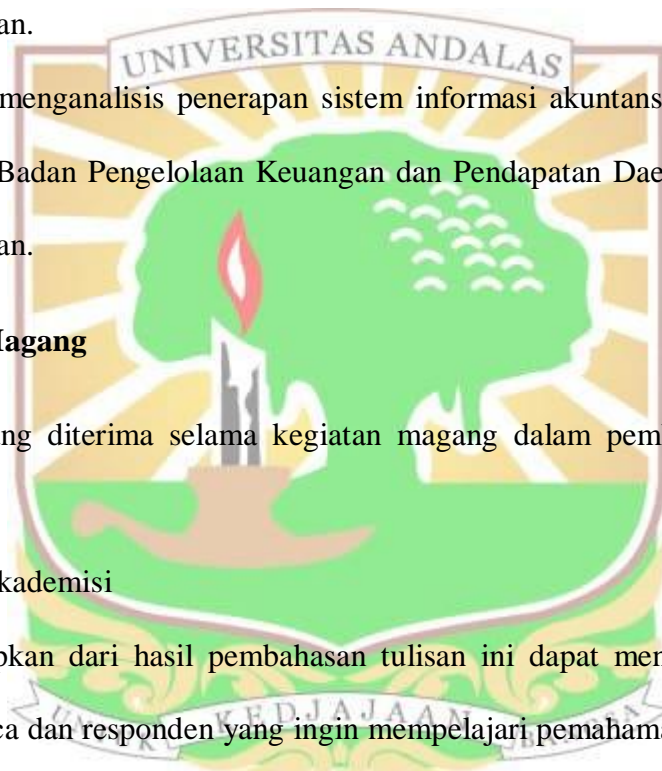
Manfaat yang diterima selama kegiatan magang dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Diharapkan dari hasil pembahasan tulisan ini dapat menjadi referensi bagi pembaca dan responden yang ingin mempelajari pemahaman sistem informasi akuntansi pada prosedur penerimaan dan pengeluaran kas.

2. Bagi Instansi Magang

Diharapkan dari hasil pembahasan tulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam melakukan suatu mekanisme dalam menyampaikan informasi pengelolaan keuangan serta memutuskan suatu kebijakan atau keputusan manajemen.





### 3. Bagi Penulis

Diharapkan dari hasil pembahasan tulisan ini dapat dijadikan pedoman dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk masa yang akan datang.

### 1.5. Metode Magang

Metode magang dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Observasi merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi dengan mengamati atau memperhatikan suatu peristiwa yang terjadi di suatu lingkungan. Untuk itu, penulis melakukan pengamatan terhadap aktivitas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di instansi magang. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber yang memiliki pemahaman terkait dengan penulisan ini dan berada di lingkungan instansi magang.

### 1.6. Tempat dan Waktu Magang

Tempat pelaksanaan magang penulis memilih Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman. Hal ini dimaksudkan untuk melihat penerapan sistem informasi akuntansi di lingkungan internal BPKPD.

Waktu pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan selama 368 jam atau 42 hari kerja. Penulis berharap selama waktu pelaksanaan kegiatan magang dapat memberikan kontribusi kerja yang memberikan keuntungan bagi instansi magang.

## 1.7. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan berguna untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas sehingga penulisan ini akan lebih terfokus pada inti pembahasan dan penulisan ini dapat dimengerti dengan mudah. Ruang lingkup pembahasan penulisan ini yaitu terfokus pada penggunaan sistem informasi akuntansi pada prosedur penerimaan dan pengeluaran kas serta kualitas sistem informasi akuntansi pada prosedur penerimaan dan pengeluaran kas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.

## 1.8. Sistematika Penulisan

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode magang , tempat dan waktu magang, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan tugas akhir.

### **BAB II                    LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan diuraikan konsep dasar yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi serta penerimaan dan pengeluaran kas.

### **BAB III                    GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.

#### **BAB IV            PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan hasil kerja selama pelaksanaan kegiatan magang dengan pembahasan studi mengenai Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.

#### **BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan penulisan ini.

